

MENDUKUNG PENGEMBANGAN PROKLIM di Sulawesi Tengah

ARTIKEL LAINNYA

PERAYAAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

HASIL STUDI PENILAIAN PENGEMBANGAN MOOC di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PELATIHAN DASAR SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS bagi Tenaga Teknis Kehutanan di Papua

Editorial

Masyarakat sering kali menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kejadian cuaca ekstrem hingga perubahan pola pertanian. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang efektif. Melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi iklim membantu membangun ketahanan dengan memastikan bahwa pengetahuan dan kebutuhan lokal dimasukkan ke dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Edisi kali ini menyoroti pelibatan masyarakat dalam upaya aksi iklim (*climate actions*) yang sedang didukung FORCLIME terkait dengan pelaksanaan program nasional ProKlim atau Program Kampung Iklim di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

ProKlim merupakan gerakan nasional yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dimaksudkan untuk mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pelibatan masyarakat di tingkat tapak, desa atau kampung, menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lokal. Masyarakat dapat mengembangkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan, lebih efektif dan berkelanjutan karena Pemahaman mereka lebih mendalam tentang kondisi dan praktik lokal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 20.000 Proklim sampai dengan akhir tahun 2024.



Pelibatan masyarakat bukan sekedar aspek tambahan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim—melainkan merupakan komponen fundamental. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan tindakan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, kohesif, dan berdaya serta lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim.

Keterlibatan masyarakat yang efektif sering kali perlu berkolaborasi dan membentuk kemitraan, baik sesama lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha maupun mitra pembangunan. Kemitraan juga dapat membantu menjembatani kesenjangan antara tindakan lokal dan kerangka kebijakan yang lebih luas, memastikan bahwa upaya masyarakat selaras dengan tujuan nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kawasan penyangga cagar biosfer, selain mendukung program nasional ProKlim, FORCLIME melakukan pendampingan pelaksanaan ProKlim di tiga desa di Kabupaten Sigi, salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu.

Saatnya untuk bertindak sekarang dengan mendukung pelaksanaan ProKlim, dan kekuatan untuk mendorong keberhasilan gerakan nasional ini terletak pada komunitas kita.

Ismet Khaeruddin,

Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Mendukung Pengembangan ProKlim di Sulawesi Tengah

Catatan pendampingan pelaksanaan Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) di Desa Dukungan FORCLIME di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Muhammad Yusuf, Advisor Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari

2

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program nasional yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini dimaksudkan untuk mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak. Pelibatan masyarakat di tingkat tapak, baik di level desa, dusun, kampung, menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menargetkan terbentuknya kampung iklim (ProKlim) sebanyak 20.000 desa sampai dengan akhir tahun 2024.

Bentuk implementasi adaptasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di desa berupa pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, peningkatan ketahanan pangan, serta pengendalian penyakit terkait iklim. Sedangkan aksi mitigasi perubahan iklim yang dapat dilakukan di desa, diantaranya adalah pengelolaan sampah dan limbah, penggunaan energi baru dan konservasi energi, budidaya pertanian rendah emisi, peningkatan dan mempertahankan tutupan vegetasi, serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pada acara Penghargaan ProKlim tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa ProKlim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim. Tujuannya untuk lebih mendorong berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak. Sehingga,

ProKlim tidak hanya mencakup aksi pengendalian perubahan iklim berbasis wilayah administrasi tetapi juga akan mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas.

Dalam ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim P4./2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim, lokasi yang dapat diusulkan sebagai Kampung Iklim adalah kampung yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan selama lebih dari dua tahun dan telah memiliki kelompok masyarakat/komunitas penanggungjawab kegiatan. Desa/kampung yang diusulkan kemudian didaftarkan kedalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), merupakan sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia.

Selanjutnya, pemantauan evaluasi dan pelaporan ProKlim dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui efektivitas dan keberlanjutan program. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi untuk merumuskan tindakan antisipatif dan korektif serta menghindari kesalahan yang sama di masa mendatang. Melalui Monev ini, juga diharapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ProKlim dapat lebih ditingkatkan. Tahapan Monev dilaksanakan dan dilaporkan secara berjenjang.





PULAU
SULAWESI

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Provinsi
- Area inti
- Zona penyangga
- Zona transisi



Pelaksanaan ProKlim di Sulawesi Tengah

ProKlim merupakan gerakan nasional untuk pengendalian perubahan iklim dan akan menjadi gerakan sinergi yang mencakup seluruh negeri. Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sedang dalam upaya melaksanakan kegiatan ProKlim di seluruh kabupaten/kota. Salah satu target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 500 desa di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan 30 desa diantaranya berada di Kabupaten Sigi. Pelaksanaan ProKlim di kabupaten/kota dalam wilayah Sulawesi Tengah dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang berpartisipasi aktif dalam program ini.

Dalam implementasinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi memberi kesempatan kepada seluruh desa yang diketahui telah melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk berpartisipasi dalam ProKlim. Desa-desa di Kabupaten Sigi yang telah diusulkan

dan telah ditetapkan sebagai Kampung Iklim antara lain Desa Karunia di Kecamatan Palolo, dan Desa Beka di Kecamatan Marawola. Desa Karunia telah memperoleh Penghargaan ProKlim Kategori Utama, yang diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada **Kepala Desa Karunia, Ferofius** pada Selasa 24 Oktober 2023 di Auditorium DR. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Dalam pengusulan dan penilaian ProKlim, DLH Sigi melaksanakannya secara bertahap pada desa yang ada di Kabupaten Sigi. Pada tahap 1, diusulkan dua desa di Kecamatan Palolo (Bobo dan Rahmat); Tahap 2, diusulkan tujuh desa, yaitu Sintuwu, Petimbe, Bakubakulu, Tanah Harapan, Ranteleda, Sarumana dan Ampera. Sedangkan desa-desa lainnya akan diusulkan sebagai lokasi ProKlim pada tahun depan.

Rumah anggrek di Desa Karunia



Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Menjaga Lingkungan

Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah telah menerbitkan kebijakan yang mendukung dan menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Palu sebagai salah satu contoh, telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pembatasan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam.

Seperti halnya Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi membatasi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan styrofoam, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 2 Tahun 2022.

Untuk mengatasi perubahan iklim dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah sampai dengan tingkat desa juga membuat aturan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung isu-isu berkelanjutan dan perubahan iklim di seluruh sektor. Desa Karunia sebagai contoh, telah menerapkan aturan memberi hadiah bagi masyarakat yang telah melakukan penanaman berupa pemberian bantuan instalasi pipa saluran air ke rumah warga. Selain itu, Pemerintah Desa Karunia melarang membuang kemasan pestisida sembarangan, dengan ketentuan sanksi sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.



Atas: Desa Karunia mendapatkan penghargaan Proklamasi kategori utama dari KLHK. **Tengah:** Pelatihan terkait Budidaya Anggrek Desa Karunia—Foto: Joshua Marunduh. **Bawah kanan:** Jalan menuju lokasi wisata di Desa Karunia. **Bawah kiri:** Kebun cokelat masyarakat —Foto: Ratu Wina.



Desa Karunia memberi hadiah bagi masyarakat yang telah melakukan penanaman berupa bantuan instalasi pipa saluran air ke rumah warga.



FORCLIME dukung Implementasi ProKlim di Kabupaten Sigi

FORCLIME merupakan program yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa, utamanya di desa-desa dukungan di provinsi wilayah kerja (Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Selatan). Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, FORCLIME mendukung program-program pemerintah di wilayah kerjanya, termasuk di wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

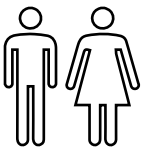
Untuk mendukung program nasional ProKlim dan dalam rangka penguatan kawasan penyangga Cagar Biosfer Lore Lindu di Kabupaten Sigi, FORCLIME memfasilitasi pelaksanaan ProKlim di kabupaten tersebut, termasuk mendukung penyusunan kerangka kerja (*framework*) implementasi ProKlim Kabupaten Sigi 2024. Secara

garis besar, kerangka kerja Dukungan Pelaksanaan ProKlim Kabupaten Sigi disusun dengan tujuan untuk menentukan langkah kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi dan FORCLIME. Dimulai dari kegiatan sosialisasi, pengusulan desa ProKlim sampai dengan dukungan kepada desa penerima Penghargaan Kategori Utama untuk mencapai Kategori Lestari.

Pelaksanaan kerangka kerja ini dilaksanakan untuk desa di Kabupaten Sigi, khususnya pada desa yang didukung FORCLIME. Dari beberapa desa tersebut, terdapat dua desa dukungan yang akhirnya menerima Penghargaan Kategori Utama, yaitu: Desa Karunia di Kecamatan Palolo, dan Desa Beka di Kecamatan Marawola.

DESA KARUNIA

Merupakan desa wisata. Secara topografis didominasi perbukitan dengan 90% tingkat kemiringan curam hingga terjal. Dataran yang sedikit landai yang diperuntukan bagi pemukiman, perkebunan dan jalur transportasi.



Jumlah penduduk:
579 (laki)
542 (perempuan)



Mata pencaharian didominasi oleh:
petani kakao.

Kelompok ProKlim:
Pemerintah Desa Karunia

Desa Karunia telah melakukan aksi-aksi iklim (*climate actions*), antara lain:



- **Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dengan adanya irigasi, sumur, tandon, penampungan air.**



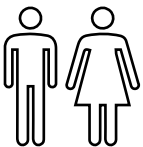
- **Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan melaksanakan 3M (menguras, menimbun, menutup),** pengelolaan ikan dalam kolam warga, dan melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).



- **Peningkatan tutupan vegetasi melalui kegiatan penghijauan dengan menanam pohon** khususnya pada lokasi yang menjadi desa wisata sebagai kekuatan dalam mempertahankan nilai konservasi desa mereka yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu.

DESA BEKA

Secara topografis didominasi dataran landai. Diantara pemukiman dan Pegunungan Gawalise, terdapat Hutan Purba Ranjuri, memiliki pepohonan yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun.



Jumlah penduduk:
1.520 (laki)
1.472 (perempuan)



Mata pencaharian didominasi oleh:
Pertanian jenis tanaman sayuran dan buah-buahan semusim.

Kelompok ProKlim:
Pemerintah Desa Beka

Desa Beka telah melakukan aksi-aksi iklim (*climate actions*), antara lain:



- **Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor** dengan adanya irigasi, sumur, tandon, penampungan air.



- **Pencegahan dan pengendalian penyakit dengan melaksanakan 3M (menguras, menimbun, menutup),** pengelolaan ikan dalam kolam warga, dan melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).



- **Peningkatan tutupan vegetasi melalui kegiatan penghijauan dengan menanam pohon khususnya di areal penyangga Hutan Purba Ranjuri,** yaitu area penggunaan lain (APL) yang mengelilingi kawasan Hutan Purba Ranjuri, dan memiliki vegetasi.



- **Pengolahan sampah dengan melibatkan pemerintah desa (BUMDes)** dan warga sebagai pengelolanya.

Selain ketiga desa tersebut, FORCLIME juga mendukung Ngata (Desa) Toro, desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu, yang berada di kawasan penyangga Cagar Biosfer Lore Lindu. Ngata Toro berkontribusi signifikan dalam hal konservasi dan pengendalian perubahan iklim berbasis kearifan lokal sejak turun temurun. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan di desa tersebut atau yang biasa disebut “*Tina Ngata*”. Kelompok ini berperan aktif dalam memberikan pendidikan konservasi pada anak-anak, dengan mengajarkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, selain mengajarkan bahasa daerah dan tradisi budaya.

Ibu Rukmini Toheke adalah salah satu *Tina Ngata*, yang mengajarkan nilai-nilai konservasi dan pengendalian perubahan iklim melalui Sekolah Adat. Dengan dukungan FORCLIME, sekolah adat tersebut menyusun modul ajar dan mendokumentasikannya. Modul ajar tersebut dirangkaikan dengan praktik, antara lain penanaman pohon di sepanjang sungai sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan, selain menjaga sawah agar tidak tergenang dari luapan air sungai. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi generasi muda

untuk berpartisipasi menjaga alam Ngata Toro atau dalam bahasa Kulawi disebut “*Tondo Lino Ngata Toro*”. Hal ini juga yang menjadikan Ngata Toro menjadi salah satu desa yang diusulkan untuk program kampung iklim.

Guna mendukung DLH Sigi untuk pelaksanaan ProKlim, FORCLIME mendukung Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sulawesi dan Dinas Lingkungan Hidup Sigi mengadakan sosialisasi tentang ProKlim pada akhir Juni 2024 bagi perangkat desa di Kecamatan Palolo. Tujuannya agar para aparat pemerintah desa di kecamatan tersebut mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan pelaksanaan ProKlim.

FORCLIME telah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan khususnya kepada desa-desa yang saat ini telah menerima penghargaan dan yang diusulkan untuk ProKlim. Salah satu dukungan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendampingan intensif minimal ke 10 lokasi baru untuk didaftarkan sebagai Kampung Iklim dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Harapannya semua desa dukungan akan mendapatkan penghargaan tertinggi dalam Program Kampung Iklim, yaitu Kategori Lestari.

FORCLIME telah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan khususnya kepada desa-desa yang saat ini telah menerima penghargaan dan yang diusulkan untuk ProKlim.

Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kabupaten Sigi melalui Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan SMAN 6 menyelenggarakan acara yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait lingkungan hidup. Acara tersebut diadakan pada tanggal 13 Juni 2024 di Hutan Purba Ranjuri, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam perayaan tersebut diadakan rangkaian kegiatan, termasuk menanam pohon dan pengembalian (*restocking*) anggrek ke habitat alamnya di hutan, dalam hal ini di Hutan Purba Ranjuri, yang telah ditetapkan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Sulawesi Tengah. Hutan ini hanya berjarak sekitar 13Km dari Kota Palu. Jarak yang tidak terlalu jauh dari ibukota memiliki potensi untuk pengembangan Hutan Purba Ranjuri.

Pelaksanaan perayaan ini bertujuan untuk:

- **Meningkatkan penyadartahuan (*awareness*) masyarakat** akan pentingnya menjaga lingkungan.- Pengayaan Hutan Purba Ranjuri melalui kegiatan penanaman pohon dan *restocking* anggrek. Kegiatan *restocking* anggrek ini didukung oleh FORCLIME.
- **Sosialisasi potensi alam** di Kabupaten Sigi dalam rangka penyusunan *grand design* Hutan Purba Ranjuri.
- **Meningkatkan pelibatan masyarakat** di sekitar Hutan Purba Ranjuri untuk melindungi dan melestarikan hutan tersebut.



“Jangan menunggu sumber daya alam kita rusak setelah itu baru tersadar, dan perlu diketahui bahwa sebesar apapun upaya, biaya dan tenaga yang kita keluarkan tidak dapat mengembalikan alam seperti sedia kala. Jadi jaga sumber daya alam kita sebelum rusak”, kata Senior Adviser FORCLIME dan Koordinator Provinsi FORCLIME Sulawesi Tengah, Bapak Ismet Khaeruddin, saat mengingatkan kembali tentang pentingnya menjaga sumber daya alam yang harus juga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Setelah kegiatan ini, kolaborasi antara Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata serta SMAN 6 akan dilanjutkan dengan melanjutkan kegiatan Monitoring *restocking* anggrek dan menyusun program bersama masyarakat terkait kegiatan pelestarian dan perlindungan Hutan Purba Ranjuri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- **Arif Hidayat**, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
- **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil Studi Penilaian Pengembangan MOOC di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki rencana dan target terkait pemenuhan kebutuhan pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN dalam skala lebih luas. Untuk itu, Pusat Diklat mempersiapkan pengembangan pelatihan terbuka secara daring (*Massive Open Online Course – MOOC*), merupakan salah satu solusi efektif untuk menyelenggarakan pelatihan jarak jauh bagi ASN di KLHK yang jumlahnya hampir 16.000 orang.

Untuk itu, Pusat Diklat SDM LHK melakukan studi penilaian (*assessment study*) mengenai pengembangan MOOC pada bulan Maret 2024. Rangkaian kegiatan dilakukan selama pelaksanaan penilaian, termasuk mengadakan lokakarya, wawancara dan diskusi dengan para pihak. Studi ini dilaksanakan oleh Common Sense, sebuah lembaga konsultan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran.

Hasil studi tersebut dipaparkan di depan Kepala Pusat Diklat SDM LHK beserta jajarannya pada tanggal 7 Juni 2024 secara daring. Dalam

paparannya, Common Sense menyampaikan hasil yang dinilai selama *assessment study*, termasuk kesiapan sumber daya manusia, ekspektasi dari manajemen Puduklat dan para pihak, kapasitas teknologi. Dalam acara ini juga dilakukan diskusi untuk mendapatkan gambaran hasil studi yang menyeluruh serta lebih komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan pelatihan bagi pelatih (*training of trainers*) bagi para Widyaiswara dan Tim eLearning di Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK). Selain itu, akan diadakan diskusi untuk menyusun roadmap untuk pelaksanaan pelatihan terbuka secara daring (MOOC) di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- **Naufal Abdillah**, Junior Advisor bidang Pengembangan Kapasitas SDM
- **Danan P. Hadi**, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
- **Edy Marbyanto**, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM

Pelatihan Dasar Sistem Informasi Geografis bagi Tenaga Teknis Kehutanan di Papua

“Materi pelatihan sangat aplikatif, sesuai dengan kebutuhan kerja pada bidang kehutanan. Pemateri sangat ahli dan responsif terhadap peserta pelatihan”, kata Bapak Maichel Franclin Kareth, Staf Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan DKLH Papua. **“Perlu ada pelatihan lanjutan dan diikuti peserta yang sama agar berkelanjutan dan tepat sasaran,”** tambah pak Maichel

Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas SDM Kehutanan Provinsi Papua dalam bidang sistem informasi geografis (*geographical information system*-GIS), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua bersama FORCLIME mengadakan pelatihan GIS tingkat dasar bagi tenaga teknis kehutanan yang berada di bawah administrasi DKLH. Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Juni 2024 di Jayapura, Papua diikuti oleh 32 peserta, 10 diantaranya adalah perempuan. Secara umum, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM kehutanan di lingkup DKLH, termasuk kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan cabang DKLH, untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengelolaan hutan. Pelatihan ini menggunakan aplikasi berbasis bebas dan sumber terbuka (QGIS).

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan DKLH Papua, Dr. Estiko Tri Wiradyo, SH. M.Si., mengatakan bahwa kemampuan GIS merupakan hal penting dalam membuat

perencanaan. Oleh karena itu, DKLH sangat perlu staf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai GIS.

Pelatihan ini difasilitasi oleh FORCLIME. Instruktur pelatihan adalah dua advisor FORCLIME, yaitu Danan P. Hadi (Advisor Penginderaan Jauh/GIS dan eLearning) dan Ruben Yogi (Advisor GIS dan Pemetaan). FORCLIME juga melibatkan bapak Amadion A. Wanaputra, S.Hut, M.Si., pengelola Laboratorium GIS Universitas Ottow Geissler Papua, untuk secara bersama memfasilitasi kegiatan pelatihan. Pelibatan Bapak Amadion dalam pelatihan ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memperkenalkan keberadaan Laboratorium GIS UOGP kepada lingkungan mitra kerja FORCLIME.

“Materi yang diberikan mudah dimengerti. Pembelajaran dari pelatihan ini sangat mendukung untuk mengerjakan pembuatan Peta KPH yang ada di Provinsi Papua. Saya berharap ada pelatihan lanjutan dengan tingkat yang berbeda agar peserta bisa meningkatkan ilmu yang didapat”, kata Ibu Elishe Janet Lusikooy, Staf Bidang Perencanaan Kehutanan DKLH Papua

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah *coaching* atau *mentoring*, khususnya untuk KPH dampingan FORCLIME. Sehingga KPH mampu membuat peta-peta yang akan menjadi bagian dari dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

- Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
- Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan Pemetaan
- Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de